



1. Pendidikan Bermutu, bagaimana?

Pendidikan bermutu tidak dapat dilihat dari segi gurunya saja. Pendidikan di Tanjungbalai dari segi sarana prasarana sudah memadai, sudah cukup, atau tidak diragukan lagi. Apakah cukup hanya gedungnya saja yang cantik? bagaimana laboratoriumnya? apakah sudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau untuk itu dapat dikatakan sudah baik. Lalu tadi sistem itu terdiri dari; input (masukan), ada proses, output (keluaran), dan outcome (hasil), dan ada pula *infact* (pengaruh). Lalu yang mana harus kita lihat dulu? komponen mana yang sudah diukur? Apakah outputnya dari segi hasil belajarnya saja? Kalau masih sampai proses, hal itu masih jauh ketinggalan. Baiklah, dari segi gurunya, sungguh

peran guru sangat diakui. Kalau rendah hasil belajar maka gurunya yang salah, ya mungkin dapat diterima. Jangan-jangan ada faktor yang lain, yang tidak diberikan para pengawas. Pada umumnya apa masukan, gagasan dan solusi dari pengawas, apakah hal itu direspon? Apakah hal itu direspon oleh kepala sekolah, apakah hal itu direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Apakah hal itu direspon oleh guru? Jangan-jangan apa yang menjadi temuan yang diberikan oleh pengawas hanya masuk tong sampah saja. Ini adalah salah satu komponen sistem, guru, pengawas, dan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah menjalankan kepemimpinan? bagaimana manajemennya? Faktor ini juga berpengaruh. Semua ini harus dilihat. Apakah sebagai kepala sekolah sudah menjalankan manajerial yang baik? Sebagai perbandingan. Begitu kita sudah mencontohkan di ITB skornya 100 % baik, sementara kalau di UNIMED yang diolah seperti mengolah singkong menjadi keju yang enak. Jadi mengolah bahan yang bagus tentu berbeda dengan cara mengolah bahan yang kurang bagus supaya hasilnya bagus. Bagaimana pula masalah gurunya? bagaimana upayanya? Saya agak sedih mendengarnya, kalau dengan berbagai program pelatihan sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetapi mutu pendidikan di Tanjungbalai masih tergolong rendah. Sekali lagi saya sedih mendengarkannya. Saya melihat dari sudut pandang pendidikan, karena keahlian saya adalah teknologi pendidikan. Intinya adalah bagaimana memudahkan

orang belajar dengan menggunakan pendekatan sistem yang memanfaatkan sumber belajar yang berorientasi kepada hasil belajar.

Itu pengertian secara gamblang mengenai pengertian teknologi pendidikan. Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan! Sudah seperti apa proses pelatihan yang dilakukan? Pernahkan dilakukan seleksi input? Apakah guru-guru juga pernah dilihat kebutuhannya? jangan-jangan tidak pernah dianalisis kebutuhannya? Jangan-jangan yang masuk ke pelatihan itu guru yang harus dilatih, tetapi hanya sekedar karena temannya kepala sekolah, lalu dikirim untuk pergi saja mengikuti pelatihan, jalan-jalan saja ke kota Tanjungbalai, dapat honor atau dapat uang kantong. Hal ini perlu saya tanyakan untuk renungan kita. Kemudian prosesnya bagaimana? Siapa saja di situ yang berperan? Karena proses itu ada tenaga pendidikan, ada kurikulum, ada media yang beragam, ada administrasi bergabung dalam satu proses. Hal ini harus diperhatikan satu per satu. Apakah hal itu sudah diperhatikan? Tentu saja agar menghasilkan output (keluaran) yang bagus. Kemudian setelah usai pelatihan perlu dievaluasi. Apakah benar atau tidak dilaksanakan apa yang direncanakan? Kegiatan yang direncanakan empat hari, benar tidak dilaksanakan empat hari, jangan-jangan ada pemotongan hari". Saya memang agak ekstrim, karena selama ini begitu yang saya lihat". Pernah tidak outputnya dilihat, hasil (*outcome*) dilihat? Jadi seorang pengelola pelatihan harus menilai dari input, proses, output dan outcomenya. Bagaimana keadaan

peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan? apakah ilmu dan keterampilan yang diperolehnya dalam pelatihan dilaksanakan di sekolah tempatnya mengajar? Hal ini harus dievaluasi setelah empat atau enam bulan. Jangan langsung dilihat muridnya. Murid belum tentu menggambarkan hasil *outcome* dari proses pelatihan. Bagaimana kita melihat kinerja guru kalau memang guru yang dilatih tidak berubah kualitasnya. Kita lihat pengawas kalau pengawas. Kita evaluasi kinerja kepala sekolah kalau kepala sekolah yang dilatih. Semuanya dievaluasi setelah mereka selesai pelatihan sekolah. Pulang ke sekolahnya masing-masing, benarkah ilmu dan keterampilan yang diperoleh dilaksanakannya? Jadi kita memandangnya satu sistem, tidak parsial, harus secara keseluruhan. Pernah tidak diperhatikan tukang sapu di sekolah? Pernahkah ditingkatkan kualitasnya? pegawai, tukang sapu, dan pegawai lainnya? Tanpa mereka kita tidak bisa mengajar dengan baik. Pernahkah dilihat petugas perpustakaan? Semuanya harus diberdayakan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi kita jangan menganggap enteng dengan tukang sapu, karena ketika dia malas, maka bisa saja sudah jam delapan atau jam sembilan dia baru datang, bagaimana masalah disiplin belajar?

Charles Hoy (2000:12) dalam *Improving Quality in Education*, menjelaskan mutu pendidikan adalah suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat-bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Perbaikan proses pendidikan adalah level tertinggi dari keunggulan yang akan dicapai.

Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulus dengan nilai baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan pelajar, guru dan masyarakat secara cepat dan tepat sehingga semua merasa puas atas layanan sekolah.

Di samping kriteria di atas, kualitas pendidikan yang berhasil ditandai dari :

- 1) Tingginya rasa kepuasan pengajaran, termasuk tingginya pengharapan murid,
- 2) Tercapainya target kurikulum pengajaran,
- 3) Pembinaan yang sangat baik terhadap spiritual, moral, sosial dan pengembangan budaya para pelajar,
- 4) Tidak ada murid yang bermasalah dalam kejiwaan atau risiko emosional,
- 5) Tidak ada pertentangan antara hubungan murid dengan para staf/guru.

Earnshar (Oliver, 2000), berpendapat bahwa dalam bidang pendidikan agar tercapai kebutuhan pelanggan

hari ini dan mendatang diperlukan mengembangkan kurikulum secara terus menerus berdasarkan suara hati dari pasar yang telah diteliti. Tentu di dalamnya perlu ada rencana pemasaran lulusan, kejelasan spesifikasi lulusan dibangun dari rencana sumber daya yang ada. Hal ini terkait dengan apa sebenarnya pelanggan dan apa produk dalam manajemen mutu terpadu. Pelanggan utama pendidikan tentunya adalah pelajar. Yaitu orang yang menerima layanan pendidikan dan latihan (*learner, student, trainee*). Sedangkan produk adalah peluang pembelajaran (*learning opportunity*) yang harus tercapai keperluan yang elemennya adalah kurikulum dan sumber daya pembelajaran.

2. Menggunakan tes kognitif sebagai ukuran mutu, tepatkah?

Kemudian mengenai tes kognitif, apakah ini bisa menunjukkan kualitas? Secara langsung mungkin tidak. Tetapi perlu ditanyakan untuk apa dilakukan tes kognitif, apakah sekedar untuk diketahui saja? Bahwa bila setiap siswa itu dites kemampuannya. Tetapi harganya begitu mahal. Supaya apa siswa dites, tentu supaya diketahui karakteristik siswa secara keseluruhan, bisa diketahui oleh guru kemampuan siswa sebelum belajar dimulai dan setelah belajar nantinya. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan pendekatan pembelajaran kepada siswa. Kalau ada 40 orang siswa (saya tidak sependapat satu kelas 40 orang). Tapi kalau kebijakan 40 orang satu

kelas dikurangi, maka akan memakan biaya besar. Misalnya membuat 1: 20, maka akan lebih banyak ruang kelas yang diperlukan. Kalau 40 orang siswa berbeda, maka para guru harus menggunakan 40 pendekatan pembelajaran, 40 teknik mengajar, karena itu jangan dibuat hanya satu pendekatan pembelajaran tentu saja tidak cocok. Kondisi yang begini tidak mungkin menghasilkan hasil yang baik. Maka inilah gunanya mengetahui siapa yang akan kita ajar? Bukan anak siapa yang akan diajar? Bukan itu, bukan anak walikota. Tetapi yang menjadi perhatian seperti apa cara belajarnya, seperti apa IQ nya, seperti apa karakteristiknya? Seperti apa sikapnya, seperti apa minatnya? Di sinilah perlu ahli psikologi pendidikan. Maka pada setiap sekolah perlu ada ahli psikologi pendidikan untuk membantu mengenal murid-murid secara baik”.

3. Bagaimana prospek wajib belajar 12 tahun?

Saya bersyukur, bahwa kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah satu program yang cemerlang. Telah nampak apa yang dicapai kota Tanjungbalai setelah reformasi dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Tanjungbalai belum puas dengan apa yang dicapai selama ini melalui wajar 9 tahun adalah hal yang wajar..

Lalu apa upayanya? Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada data-base-nya, bagaimana peta pendidikan Tanjung Balai? Termasuk siswa, guru, paling tidak kualitas seperti apa, kualifikasi guru untuk

menanganinya, termasuk seperti apa budaya masyarakat yang melembaga dalam masyarakat kita, seperti apa profil yang sudah ada? Hal itu penting supaya dapat dirancang pendidikan tahun 2020. Seperti apa yang ada sekarang, dan seperti apa yang diinginkan tahun 2020. Kemudian apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sudah bagus. Artinya, kebijakan dan program pemerintah pusat dalam bidang pendidikan sudah bagus bagi orang yang mampu melaksanakannya. Baru-baru ini Menteri Pendidikan Nasional sudah mengulas dalam harian Kompas, bahwa KBK itu termasuk sosialisasinya kurang berhasil. Ada tiga hal terkait KBK bahwa: (1) penerapan KBK, harus punya sarana dan prasarana yang lengkap, (2) sumberdaya manusianya, gurunya tidak siap untuk menjalankan KBK itu sendiri, SDM nya tidak siap, (3) rasio guru dengan murid tidak bisa berjalan dengan baik dengan 1:40, meskipun programnya bagus”.

4. Bagaimana dengan adanya sekolah Unggulan?

Kalau ada sekolah unggulan yang khusus ada baiknya. Tapi dengan adanya sekolah plus, jangan hanya plus-plus-an. Masalahnya saya pikir perlu ada kesiapan masyarakat. Karena yang masih kurang salah satunya adalah kurang siapnya masyarakat, mereka belum siap kalau anaknya tidak siap masuk ke sekolah plus, tapi akhirnya dipaksakan, lalu dibuat katabelece, maka masuklah anaknya. Ini kesiapan masyarakat itu? Jadi hal ini erat kaitannya dengan wajib belajar 12 tahun tadi.

Partisipasi masyarakat atau orang tua sangat penting. Kalau orang tua masih pas-pasan ekonominya sehingga anaknya diajak untuk bekerja, tentu akan sulit pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Tapi kalau ada dana yang dapat membantu pendidikan dengan bebas biaya, tentu saja hal ini sangat bagus.

Mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka iklim sekolah harus positif/konduusif. Perencanaan sekolah yang bagus dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Tidak ada yang dominan di tangan kepala sekolah dan guru. Serahkan semuanya kepada warga sekolah/komite untuk merancang sampai Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Sekolah (RAPBS) perlu melibatkan semua pihak terkait utamanya komite sekolah, agar dukungan bagi kemajuan sekolah semakin meningkat. Apa sebenarnya tugas Dewan Pendidikan Komite Sekolah?

Dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 044/U/2002, bahwa Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah berkedudukan di sekolah.

Tujuan Dewan pendidikan, untuk:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan,
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,

- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Peran Dewan pendidikan disebutkan, sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan,
- 2) Pendukung baik finansial maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan,
- 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan,
- 4) Mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan masyarakat.

Komite sekolah bertujuan, untuk:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
- 3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran Komite Sekolah, yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan,

- 2) pendukung baik finansial maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
- 3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,
- 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sekolah perlu berkolaborasi dengan semua pihak terkait. Banyak memanfaatkan keterampilan mengambil keputusan. Guru harus berkualitas, harus S.1, dan kurikulumkan efektif. Pada gilirannya akan melahirkan sekolah-sekolah efektif juga. Sekolah berkualitas unggul.

Menurut Urlich (1981:19) untuk mengusahakan agar sekolah menjadi efektif, maka seluruh sumber daya lembaga pendidikan harus diarahkan untuk membuat pembelajaran efisien, unggul dan efektif.

Mengapa setiap personil sekolah saat ini dituntut agar mengusahakan efektivitas sekolah? Karena paradigma baru pendidikan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*).

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas, Laporan Nasional tentang Pembangunan Pendidikan Negara Indonesia, Jakarta: Balitbang Depdiknas. 2001.

Hoy, C, Bayne, C, Jardine, B dan Wood, M. (2001). *Improving Quality in Education*. London: Falmer Press.

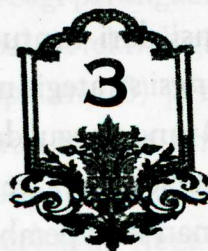
Oliver, Paul, ed. *The Management of Educational Change*, England: Ashgate Publishing Limited, 1996.

Ulrich, Donald, C. dkk, *Teaching Strategies*. Massachusset: Heath and Company. 1980.

BAGIAN III

KOMITMEN UNTUK PENCAPAIAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh: Zainuddin



K eberadaan semua jenis dan jenjang sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK) dalam sistem pendidikan nasional merupakan salah satu pranata budaya yang dihadapkan dengan berbagai tantangan yang rumit dewasa ini. Di satu sisi sekolah berhadapan dengan cepatnya perubahan akibat globalisasi dan otonomi daerah yang memunculkan persaingan dalam pengelolaan sekolah negeri dan swasta. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi dan transportasi menuntut perlunya upaya relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat terhadap mutu lulusan (*output*). Bahkan saat ini, muncul globalisasi pendidikan dengan berdirinya sejumlah sekolah internasional di Indonesia.

Dengan begitu, lulusan setiap sekolah dituntut untuk lebih siap melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Setelah itu, lulusan sekolah juga ditantang agar dapat mengisi lapangan kerja profesional yang memiliki peran strategis dalam proses transformasi kebudayaan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani. Konsekuensi dari tuntutan tersebut adalah setiap sekolah berfungsi strategis menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sangat diperlukan untuk memenuhi tersedianya tenaga terampil bagi pelaksana pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai terobosan program dan kerjasama peningkatan mutu baik internal maupun eksternal sangat diperlukan. Hal tersebut perlu dirancang untuk mengembangkan lulusan yang terampil dan unggul (*center for excellence*) sebagai sumber daya manusia terampil memasuki dunia kerja sangat diperlukan dewasa ini.

1. Bagaimana mutu pendidikan yang diinginkan dalam menghadapi globalisasi?

Pendidikan yang memberdayakan masyarakat di abad ke-21 tentu tidak hanya didasarkan kepada kebijakan dari atas, tetapi harus memperhatikan apa yang diperlukan anak-anak, sesuai konteks dan isi domain sosial budaya yang ada pada zaman ini.

Menurut Papadapoulos (1998: 26) di abad ke-21, ada beberapa konteks baru pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan masa depan yang tidak bisa diabaikan, yaitu: (1) pertumbuhan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pendidikan dan pengajaran canggih dan berguna bagi peningkatan budaya dan ilmu masyarakat; (2) perubahan teknologi akan berlanjut pada suatu tingkat percepatan, (3) perubahan demografi diarahkan pada semua tempat untuk suatu distribusi ulang mengenai kelompok usia, (4) meningkatnya saling ketergantungan berbagai negara, (5) munculnya kepedulian sosial baru di masyarakat dan pendidikan diharapkan memainkan peran aktif dalam mencapai hal tersebut, (6) perubahan sikap terhadap peran kebijakan publik dan cara dalam pelayanan publik berkaitan dengan administrasi dan pembiayaan.

Untuk menata pendidikan di masa depan, perlu dipahami dan diaplikasikan konsep sistem dalam pendidikan. Karena dengan memahami sistem administrasi dan pendidikan akan membantu para pengelola pendidikan, tak terkecuali kepala sekolah dalam mengatasi berbagai masalah baik internal maupun masalah eksternal guna memajukan pendidikan pada semua daerah di Indonesia.

Pencapaian mutu pendidikan nasional diperkirakan masih sekitar 55 % dari 100 % yang diharapkan. Banyak faktor yang memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan nasional, di antaranya:

1. Manajemen dan kepemimpinan sekolah belum sungguh-sungguh dijalankan dengan baik. Paling tidak baru sekitar 60 %
2. Kualitas guru yang mengajar baru 36% guru yang layak mengajar: Guru yang mengajar harus bermutu: tinggi tingkat pendidikan, ikhlas, profesional. Namun faktanya, guru yang mengajar masih kurang bermutu: pendidikan masih rendah dan kurang ikhlas. Bahkan guru yang mengajar banyak tidak bergairah, baru 40 %.
3. Fasilitas yang belum standar.
4. Budget-dana pendidikan baru 8 %.

Dalam hal ini tolok ukur pendidikan yang berhasil, yaitu:

- a. Pendidikan berkualitas
- b. Sumberdaya manusia berkualitas mampu dan kreatif mengolah sumberdaya alam, modal melahirkan produk berkualitas untuk memakmurkan rakyat sehingga ekonomi bangsa menjadi maju.

Sebagai perbandingan, bahwa di Indonesia baru memperoleh pendapat perkapita 500 US \$ pertahun, sedangkan pendapatan per kapita Malaysia dan Swiss sudah mencapai 7000 US \$ per tahun.

Jadi kalau ingin maju, maka para pelaksana pendidikan harus kerja keras. Faktor ini akan menentukan 90 % keberhasilan, sedangkan kecerdasan

hanya 10 %. Jadi wajib belajar 9 tahun dengan APK 88 % ke atas adalah kebanggaan karena secara nasional sampai 2004 masih ada 2 juta orang penduduk belum selesai/tuntans wajib belajar 9 tahun sehingga diperpanjang waktunya.

Semua administrator pendidikan dan pihak terkait dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 di kota Tanjungbalai saat ini harus didukung semua pihak karena merupakan hal yang berani. Khusus di kota Tanjungbalai wajib belajar 12 tahun dapat dilaksanakan dengan persiapan, yaitu: identifikasi anak-anak usia SD/SMP/ dan SMA/SMK/MA pada setiap Kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.

Jadi para administrator pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Balai harus memiliki visi 2020. Bagaimanapun, menurut Newell (1978) para administrator adalah meliputi orang-orang yang berkoordinasi dari usaha-usaha manusia merupakan esensi dari administrasi dan mencatat berbagai problema manusia dalam organisasi menjadi jiwa administrasi.

Kenyataannya menunjukkan bahwa administrasi mencakup dimensi tugas dan sekaligus dimensi manusia. Karena itu ada berbagai pekerjaan organisasi harus dilakukan jika organisasi ingin berhasil. Demikian pula ada sejumlah orang yang mana organisasi harus memberikan berbagai macam tingkat kepuasan dan atas dasar itu mereka harus memperolehnya agar supaya pekerjaan terlaksana dengan baik oleh semua personil.

Jadi ada interaksi fungsional dalam administrasi antara orang-orang, pekerjaan yang dibagi, organisasi dan kepuasan di dalam mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi.

Lebih jauh dijelaskan Newell (1978) administrasi efektif membutuhkan pemahaman terhadap kedua dimensi secara bersamaan, baik dimensi tugas maupun dimensi manusia. Tentu saja mengembangkan kompetensi adalah penting dalam kedua dimensi tersebut. Kompetensi dalam dimensi tugas saja tidaklah cukup. Jika administrator ingin berfungsi secara bertanggung jawab dalam memberikan program pendidikan yang efektif adalah hal itu sangat diperlukan. Jika mereka bertugas dengan kepemimpinan yang kuat sehingga masyarakat menjadi terwakili dalam Dewan Pendidikan kota. Administrator pendidikan perlu mengembangkan satu pemahaman perilaku manusia dengan syarat memiliki kompetensi tinggi dalam hubungan interpersonal.

Administrasi adalah satu tugas yang menarik. Dalam bidang pendidikan, administrasi khususnya sangat berharga sekali. Administrasi berkenaan dengan pertumbuhan dan pengembangan sumberdaya manusia bangsa. Administrator dalam pendidikan boleh saja menghadapi keadaan tertentu yang rumit serta berbagai tantangan dalam bekerjasama dengan orang lain. Karena itu, para guru dan administrator perlu menyadari sepenuhnya terhadap kepentingan hubungan manusia.

Pada gilirannya mendorong hasil dari hubungan timbal balik yang baik dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dewan pendidikan, para pengawas, kepala sekolah, guru dan komite sekolah.

Iklim pengajaran dan pembelajaran pada banyak sekolah masih kurang kondusif untuk memelihara atau menyehatkan peningkatan pengajaran untuk kelangsungan sekolah. Bahkan pada sekolah dengan misi pengajaran dan komitmen publik terhadap pembelajaran unggul serta iklim sekolah harus ditingkatkan. Apa yang seharusnya dilakukan sekolah untuk mendorong iklim, memberikan dukungan dan membuat kemungkinan pengajaran unggul?

Untuk itu, iklim pengajaran dan pembelajaran yang konstruktif harus diciptakan dengan meningkatkan peran kepala sekolah dalam proses pelaksanaan program peningkatan mutu berkelanjutan.

Ada beberapa kriteria sekolah yang dapat memberikan kerangka kerja lebih baik dalam peningkatan mutu. Kualitas sekolah dengan beberapa standar keunggulan yang harus dicapai yaitu: prestasi siswa yang tinggi (pengusaan terhadap kurikulum), disiplin tinggi, tak ada kenakalan pelajar, kepribadian baik, tidak ada kegagalan dalam belajar”.

Dilihat dari segi manajemen dan efisiensi sekolah dikemukakan Hoy, dkk (2000) bahwa kualitas sekolah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kepala sekolah, atau pengawas yang efektif,
- 2) Kepercayaan penuh kepada kepala sekolah oleh staf dan guru serta orang tua,
- 3) Komitmen dan kepercayaan semua staf, administrator, dan para guru untuk hadir ke sekolah,
- 4) Manajemen yang baik dan efisien dalam penggunaan sumberdaya, mencakup keuangan yang didapat sekolah.
- 5) Nilai yang baik dari penggunaan uang yang diberikan kepada sekolah,

Dapat disimpulkan bahwa sekolah yang memiliki kualitas unggul ditandai dari bukti tingginya kepuasan terhadap hasil pengajaran, pelaksanaan kurikulum mencapai target, terpenuhinya pengembangan spiritual, moral, sosial dan pengembangan budaya, tidak ada yang gagal (tidak naik kelas, atau tidak lulus). Di sini para guru memiliki pengharapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar sehingga dapat mendorong pencapaian proses pengajaran efektif di setiap sekolah unggul.

Perubahan sikap setiap personil sekolah sangat penting agar supaya dapat membawa keberhasilan pengembangan budaya mutu sebagai prestasi yang positif pula. Pada pokoknya para guru memang memiliki kebutuhan prestasi yang berbeda yang akan muncul dan semakin baik manakala ada dorongan dengan melibatkan guru-guru dan mencapai kualitas hasil pengajaran. Jadi yang penting dalam mendorong budaya mutu di

kalangan guru adalah adanya keterlibatan yang tinggi para guru dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sehingga pengawasan dapat dikurangi.

Apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan peningkatan mutu, haruslah ditentukan terlebih dulu searah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran melalui sekolah. Setelah ditetapkan tujuan dan cara untuk mencapai prestasi yang tinggi dari penilaian hasil pembelajaran, maka haruslah dimulai dari titik sasaran memperkenalkan kebijakan untuk menjamin hasil dan pelaksanaan peningkatan mutu benar-benar ada jaminan untuk tercapai di setiap sekolah.

Langkah peningkatan mutu dalam proses pengajaran dimulai dengan memberikan bimbingan kepada guru baru dalam tahun pertama untuk bekerjasama dengan para guru berpengalaman sebagai pelatih oleh kepala sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja pengajaran seharusnya dijadikan mata pelajaran yang didiskusikan secara teratur dan ditinjau ulang dalam Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau (MGMP). Dari banyak kesulitan yang dihadapi maka diajukan dilakukan identifikasi untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Wakil kepala sekolah bidang pengajaran harus menyediakan laporan kualitas pengajaran, kemampuan pengajaran bila guru-guru menginginkan perbaikan atau konfirmasi. Kebijakan standar pengajaran di sekolah harus dihasilkan oleh sekolah sebagai akhir dari pelaksanaannya.

2. Bagaimana komitmen mutu diwujudkan di sekolah?

Setelah periode memperkenalkan kinerja pengajaran dari anggota dan staf yang harus ditinjau ulang setidaknya pada setiap tiga tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pimpinan sekolah perlu menyusun prosedur yang sesuai untuk meninjau ulang. Aktivitas penilaian ini harus mencakup pengajaran di kelas, seminar, material pengajaran yang dihasilkan, pengorganisasian mata pelajaran, inovasi isi mata pelajaran atau metode mengajar, dan kerja para tutor/penasihat. Hasilnya harus didiskusikan dengan para guru yang peduli dan memasukkan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan atau wakil kepala sekolah bidang pengajaran, untuk dapat digunakan secara bebas secara bersama sebagai umpan balik program kualitas.

Hoy (2002) menjelaskan ada beberapa tahapan yang akan dilalui untuk memantapkan budaya mutu dalam menuju sekolah unggul, yaitu:

- 1) Membangun komitmen, menanamkan dalam diri personil sekolah untuk mencapai tujuan,
- 2) Perencanaan, menggunakan keterampilan individu dan tim untuk dikembangkan mencapai tujuan,
- 3) Tindakan, untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan dalam menetapkan program berkelanjutan,

- 4) Evaluasi, menilai kemajuan pencapaian tujuan, nilai yang dicapai dan kebutuhan masa depan .

Hal yang penting dari pelaksanaan peningkatan mutu pengajaran adalah aktivitas yang diperlukan untuk perencanaan pengajaran mencakup hal-hal berikut:

- 1) Perencanaan untuk menyampaikan silabus
- 2) Melakukan perbaikan terhadap materi pelajaran,
- 3) Penataan yang efektif bagi pelaksanaan kegiatan pengajaran dan kegiatan menulis.
- 4) Efisiensi penataan dan tes untuk ujian.
- 5) Memberikan pelatihan yang baik untuk dukungan dan kemampuan
- 6) Mengakses pelajar.

Efektivitas kelas dan kemampuan personal dalam mengajar dapat dilihat dari persiapan yang baik. Selain itu dapat dilihat struktur pertemuan dengan penyampaian materi pelajaran dicapai secara baik. Kemampuan para guru dalam menggunakan alat bantu pelajaran dan teknologi pendidikan yang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran harus tidak diragukan lagi.

Proses pengajaran yang baik dalam semua tingkatan memiliki beberapa elemen yang menjadi tantangan bagi para guru untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasinya. Hal itu dapat dilihat dari rencana mengajar, materi pelajaran yang disiapkan, metode dan alat bantu mengajar, sistem evaluasi dan iklim belajar di kelas yang mendukung bagi pembelajaran yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoy, C, Bayne, C, Jardine, B dan Wood, M. (2001).
Improving Quality in Education. London: Falmer
Press.
- Newell, C. A, *Human Behavior Educational Administration*.
New Jersey: Englewood Cliffs. 1978.
- Reigeluth, C.M dan Garfinkel, R.J, *Systemic Change in
Education*. New Jersey: Educational Technology
Publications Englewood Cliffs, 1994.

BAGIAN IV

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS MUTU

Oleh: Khairil Ansari